

Refleksi

JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT

**“Agama sebagai Solusi dan Pemersatu
antar Umat”**

WACANA

Suhaimi

**Politik Islam Indonesia dan Demokrasi
Pancasila di Era Reformasi**

M. Ikhsan Tanggok

**The Role of Chinese Communities to the
Spread of Islam in Indonesia**

Ida Rosyidah

Gandhi’s Ideas of Women in Hinduism

Abdul Hadi W.M.

**Takdir Alisyahbana dan Pemikiran
Kebudayaan**

Fariz Pari

**Metodologi Penelitian Keagamaan:
Dekonstruksi Hermeneutik I**

TULISAN LEPAS

Cucu Nurhayati

**Potret Perkotaan dalam Menghadapi
Globalisasi**

Refleksi

Jurnal Kajian Agama dan Filsafat

Refleksi
Jurnal Kajian Agama dan Filsafat
Vol. VIII, No. 3, 2006

Dewan Redaksi

M. Quraish Shihab
Komaruddin Hidayat
M. Din Syamsuddin
Amsal Bakhtiar
Kautsar Azhari Noer
Hamdani Anwar
Zainun Kamaluddin Fakhri

Pemimpin Redaksi

Edwin Syarif

Anggota Redaksi

Wiwi Siti Sajaroh
A. Bakir Ihsan

Sekretariat

Suzanti Ikhlas

Penerbit

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat Redaksi

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 749 3677, 749 3579, 740 1925
Fax. (021) 749 3677
Email: jurnalrefleksi@yahoo.com

Refleksi adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 39/DIKTI/Kep./2004. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

TABLE OF CONTENTS

Editorial

- ~ Agama Sebagai Solusi dan Pemersatu Antar Umat

Articles

- 263-274 Politik Islam Indonesia dan Demokrasi Pancasila di Era Reformasi
Suhaimi
- 275-290 The Role of Chinese Communities to the Spread of Islam in Indonesia
M. Ikhsan Tanggok
- 291-302 Gandhi's Ideas of Women in Hinduism
Ida Rosyidah
- 303-330 Bagimu Dīnmu Bagiku Dīnku: Jejak-jejak Falsafah dan Sosial-Budaya Ayat al-Kāfirūn [109]: 6
Nanang Tahqiq
- 331-352 Takdir Alisyahbana dan Pemikiran Kebudayaan
Abdul Hadi W. M.
- 353-368 Metodologi Penelitian Keagamaan: Dekonstruksi Hermeneutik I
Fariz Pari

Document

- 369-382 Potret Perkotaan dalam Menghadapi Globalisasi
Cucu Nurhayati

AGAMA SEBAGAI SOLUSI DAN PEMERSATU ANTAR UMAT

Perdebatan agama sebagai solusi bagi umat manusia atau bukan masih merupakan pro dan kontra bagi sebagian orang. Ada di antara umat manusia yang menganggap bahwa agama tidak dapat memberikan solusi yang banyak bagi menyelesaikan berbagai persoalan, dan ada yang menganggap bahwa agama dapat memberikan solusi bagi banyak persoalan yang dihadapi oleh manusia. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang lari ke agama atau kepada tokoh-tokoh agama untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Sebagai contoh, banyak orang lari ke tokoh-tokoh agama untuk meminta pertolongan atas ketergantungan obat-obat terlarang yang menimpa dirinya. Contoh lain, banyak orang menggunakan lembaga-lembaga keagamaan untuk menyelesaikan berbagai konflik keagamaan. Mungkin ini yang dapat kita tangkap dari kesan yang dimunculkan dalam sebuah artikel di dalam jurnal ini.

Semua agama di dunia ini menawarkan berbagai konsep yang dapat digunakan untuk memberikan solusi bagi banyak persoalan yang dihadapi oleh umat manusia. Tentu saja konsep-konsep yang ditawarkan itu berlandaskan pada ajaran-ajaran suci yang berasal dari kitab suci masing-masing agama. Semua konsep tersebut mengarah pada bantuan yang diberikan agama untuk membawa manusia ke jalan yang benar. Konsep agama yang masih dianggap cukup jitu dalam memecahkan berbagai persoalan tersebut juga dijadikan landasan bagi banyak para ahli untuk memecahkan berbagai persoalan sosial di Indonesia.

Ada sebagian orang menganggap bahwa agama adalah dapat menyebabkan berbagai *social unrest* (kerusuhan sosial) yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia dewasa ini dan ada juga sebagian orang yang beranggapan bahwa agama bukanlah penyebab dari kerusuhan tapi agama dapat memberikan solusi bagi berbagai kerusuhan sosial yang ada. Teori ini masih tetap dipertahankan oleh banyak sarjana yang mengkaji masalah agama, terutama Suhaimi yang dalam tulisannya menyoroti persoalan agama dalam kaitannya dengan *social unrest* dewasa ini. Dalam tulisannya, Suhaimi melihat bahwa agama bukanlah penyebab dari banyak kerusuhan

sosial, tapi justru dapat dijadikan alat untuk meredam berbagai kerusuhan sosial yang ada.

Bicara masalah agama dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, rasanya kurang lengkap jika kita tidak membicarakan pelaku agama tersebut. Pelaku agama adalah para penganut agama-agama yang ada yang menyebarkan dan menjalankan ajaran agama tersebut. Di pundak para pelaku agama inilah agama tersebut dapat disebarkan ke seluruh masyarakat, dan dapat diperkenalkan kepada masyarakat tentang ajaran-ajaran perdamaian yang terkandung di dalamnya. Pelaku-pelaku agama ini, tidak hanya terbatas pada satu suku bangsa, tapi terdiri dari berbagai suku bangsa. Sebagai contoh agama Islam di Indonesia tidak hanya disebarkan oleh satu suku bangsa tapi oleh banyak suku bangsa, termasuk di dalamnya suku bangsa Cina. Banyak orang beranggapan bahwa orang Cina tidak mempunyai peran dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Mungkin anggapan tersebut dapat dikatakan kurang tepat. Karena berdasarkan sejarah penyebaran Islam di Indonesia, orang Cina juga dapat memiliki peranan penting dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Dalam proses penyebaran tersebut, tidak satu pun konflik yang kita jumpai disebabkan tindakan para pelaku agama. Mungkin ada benarnya jika banyak orang yang beranggapan bahwa Islam disebarkan di Nusantara dilakukan secara damai, dan ada kalanya menggunakan kebudayaan setempat sehingga dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.

Jika dalam tulisannya Suhaimi menyoroti persoalan agama sumber konflik atau agama dapat dijadikan alat untuk mempersatukan berbagai suku agama dan berbagai kepentingan, namun M. Ikhsan Tanggok dalam tulisannya lebih melihat peran orang Cina dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Meskipun keduanya melihat agama dengan sudut pandang berbeda, namun kedua tulisan tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Islam dalam hal ini bukan saja dilihat dari konteks ajarannya, tapi juga dapat ditelusuri dari konteks sejarahnya. Melalui sejarah tersebut, orang dapat melihat ke belakang bagaimana pelaku-pelaku agama dapat meletakkan agama yang mereka yakini sebagai komunikasi atau penghubung antara satu dengan yang lain dan dapat membuat masyarakat berlaku damai.

Dalam tulisannya, M. Ikhsan Tanggok juga melihat betapa pentingnya melihat agama dari sudut pandang budaya atau kebudayaan. Sebab agama

tidak akan diterima dengan mudah oleh masyarakat tanpa diterjemahkan dalam berbagai kebudayaan suku bangsa. Oleh karena itu, agama dipahami secara berbeda sesuai dengan kebudayaan masing-masing suku bangsa. Namun secara teologis, ajaran-ajaran agama masih tetap dipertahankan keutuhannya. Ajaran-ajaran agama tidak semata-mata menyangkut masalah teologi tapi juga membahas tentang gender yang dewasa ini lebih banyak dibicarakan dalam diskusi-diskusi dan seminar di perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi.

Sehubungan dengan gender tersebut, maka Ida Rosyida dalam tulisannya menyajikan dengan panjang lebar masalah gender, terutama pemikiran Gandhi tentang gender. Tidak ubahnya dengan tokoh-tokoh filsuf Timur, Gandhi juga melihat adanya perbedaan antara lelaki dan wanita. Wanita menurut Gandhi selalu dinomor-duakan dan lelaki memainkan peranan penting dan berkuasa atas wanita. Dalam masyarakat patrilineal, lelaki selalu di nomor satukan, tidak hanya dalam lingkungan keluarga, namun juga dalam ritual-ritual keagamaan. Hal yang sama juga dijumpai dalam agama Hindu, di mana di dalam upacara keagamaan, laki-laki memegang peranan yang lebih penting. Meskipun demikian, pemikiran Gandhi tidak terlepas dari konsep-konsep ajaran Hindu yang mereka jadikan pedoman dan acuan dalam kehidupan sehari-hari.

Agama bukan saja bicara tentang teologi, gender sebagaimana dijelaskan di atas, tapi agama juga bicara tentang perbedaan. Bicara tentang gender sama artinya bicara mengenai perbedaan, yaitu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pandangan agama-agama besar di dunia, perbedaan bukanlah “musibah” tapi “*rahmah*” atau dapat membawa keberkatan apabila kita dapat memahami arti dari perbedaan tersebut. Karena adanya perbedaan antara lelaki dan perempuan, maka populasi di dunia ini selalu bertambah atau berkembang. Dalam konsep agama Islam juga dikatakan bahwa berbagai macam suku bangsa yang berbeda-beda diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini, adalah agar umat manusia yang berbeda tersebut dapat saling kenal-mengenal dan bekerja-sama satu dengan yang lainnya untuk mencapai satu tujuan yang mulia. Inilah makna dari adanya perbedaan, dan bukan perbedaan tersebut dijadikan alat untuk memusuhi satu dengan yang lainnya dan juga melahirkan kelompok-kelompok yang tujuannya untuk menjatuhkan satu dengan yang lainnya.

Dalam ajaran agama Islam juga, Tuhan sangat menghargai adanya perbedaan, lihat saja ada ayat dalam al-Qur'an (*lakum dinukum waliadin*) yang cenderung mengakui adanya perbedaan. Dalam al-Qur'an Tuhan mengakui adanya agama di luar agama Islam. Jika Tuhan sendiri mengakui keberadaan itu, kenapa umat manusia tidak mau mengakui keberadaan yang ada di luarnya. Inilah yang mungkin sangat disoroti oleh salah satu artikel dalam jurnal ini. Dalam jurnal ini, Nanang Tahqiq, melihat bahwa perlu mengkaji ayat al-Qur'an, terutama "*lakum dinukum waliadin*" sebagai alat untuk menghargai adanya perbedaan, terutama menghargai agama di luar agama Islam itu sendiri. Nanang melihat bahwa ayat tersebut tidak dipahami oleh sebagian umat Islam sesuai dengan misi ayat tersebut yang sangat menghargai adanya perbedaan. Ayat ini juga mendorong umat Islam untuk menciptakan toleransi sesama umat beragama, sehingga di antara agama-agama yang ada di dunia ini dapat saling menghargai dan bekerja sama. Oleh Karena itu, sangat tepat jika tema terbitan jurnal **Refleksi** kali ini adalah "Agama Sebagai Solusi dan Pemersatu Antar Umat". Tema ini bermakna agar agama dapat dijadikan sebagai penyelamat dan mempersatukan berbagai umat manusia di dunia untuk tujuan kemanusiaan dan persatuan.

Jakarta, Desember 2006

Redaksi

POTRET PERKOTAAN DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI

Cucu Nurhayati

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

cucu.nurhayati@uinjkt.ac.id

Abstract: *The globalization sweeping the world today has influenced the lives of communities in general. The rapid flow of information and the increasing availability of various facilities also contribute to the acceleration of this process. Events in one part of the world are now more easily observed and imitated by people in other parts. Naturally, this phenomenon will impact the lifestyle of communities, ultimately leading to global changes. The link between globalization and urban development can be seen as a reflection of progress at a higher level. Are our communities ready to face global competition, or are we still preoccupied with internal urban issues that are increasingly prevalent today? It is concerning that while other nations are busy preparing for global competition, we seem to be stagnating. What steps should the government take to address this issue? This is an important issue that needs to be discussed, although it may seem cliché and like an old song with no end in sight.*

Keywords: *Urban areas, urban communities, globalization, social change.*

Abstrak: *Globalisasi yang melanda dunia saat ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat secara umum. Cepatnya informasi serta meningkatnya berbagai fasilitas turut mendorong cepatnya proses ini. Kejadian di suatu belahan dunia akan lebih mudah dilihat dan ditiru oleh masyarakat di belahan lainnya. Tentunya kejadian ini akan turut mempengaruhi pola hidup masyarakat yang akhirnya menunjukkan suatu perubahan yang bersifat global. Keterkaitan globalisasi dengan perkembangan perkotaan bisa dilihat sebagai cerminan pembangunan di tataran atas. Apakah masyarakat kita sudah siap menghadapi persaingan global ataukah masih sibuk mengurus masalah internal perkotaan yang makin marak sekarang ini. Patut dikhawatirkan, ketika bangsa lain sudah sibuk mempersiapkan persaingan global sementara kita masih lari di tempat. Lantas bagaimana langkah dan peranan pemerintah dalam menghadapi permasalahan ini? Inilah permasalahan penting yang perlu kita bicarakan, meskipun sepertinya sudah menjadi hal yang klise dan menjadi lagu lama yang belum ada ujungnya.*

Kata Kunci: *Perkotaan, Masyarakat Kota, Globalisasi, Perubahan Sosial.*

Jakarta sebagai “Center Place”

Jakarta sebagai kota metropolitan sekaligus ibukota negara, ibarat gula atau permen yang menjadi daya tarik semua orang. Individu-individu dari berbagai daerah dan latar belakang yang berbeda secara berbondong-bondong mendatangi kota ini untuk mencari penghidupan, Tidak heran, daerah pemukiman kumuh yang berkali-kali ditertibkan bisa tumbuh menjamur kembali karena kebutuhan akan tempat tinggal menjadi hal yang utama bagi mereka.

Jakarta sebagai kota center yang mampu memberikan janji untuk menuju perubahan menjadi acuan individu untuk mengadu nasib di kota metropolitan ini. Ketika masyarakat dari daerah berbondong-bondong datang ke Jakarta secara otomatis mereka akan mengalami beberapa perubahan. Perubahan ini mengakibatkan terjadinya perubahan sosial yang menyeluruh dan kompleks. Perubahan sosial menurut Parsons, merupakan pertukaran informasi atau energi antar individu atau kelompok dalam masyarakat secara potensial, yang bisa menghasilkan perubahan-perubahan di dalam atau di antara sistem-sistem tindakan yang telah ada sebelumnya. Sumber perubahan itu bisa berupa informasi atau energi yang dihasilkan oleh individu atau kelompok yang saling berinteraksi. Pada gilirannya informasi atau energi (yang dihasilkan) itu akan merombak sistem-sistem yang telah ada dan berpotensi menghasilkan sebuah sistem baru. Sumber perubahan yang lain adalah informasi atau energi yang kurang

memadai (*insufficient*). Dengan adanya informasi atau energi yang tidak memadai, orang dituntut untuk mengadakan penyesuaian internal (*internal adaptation*) terhadap sistem-sistem tindakan yang sedang berlaku (Turner, 1990). Di sinilah yang menjadi alasan kenapa para pendatang tetap bertahan meskipun kehidupan mereka tidak cukup layak. Lama kelamaan para pendatang tersebut sudah mulai mengadakan penyesuaian dengan situasi dan kondisi yang ada.

Apabila kita lihat dari pola hidup masyarakat kota jelas akan sangat berbeda dengan pola hidup masyarakat di daerah atau pedesaan. Masyarakat kota atau *urban society* adalah masyarakat yang ciri-cirinya berbeda dengan masyarakat paguyuban. Masyarakat kota adalah masyarakat besar, modern, heterogen, mempunyai solidaritas rendah, individualis dan lebih rasional (Reading, 1986).

Menurut Lerner, urbanisasi dan pertumbuhan kota merupakan indikator dari modernisasi dan kemajuan. Akan tetapi proses urbanisasi pada saat ini sering-kali menimbulkan permasalahan sosial. Bagaimanapun proses urbanisasi ini berbeda-beda baik di Eropa, Amerika maupun negara-negara ketiga. Perubahan di Asia Tenggara misalnya kebanyakan berpusat di kota-kota. (Chen dan Evers, 1978).

Masyarakat merupakan kumpulan individu yang mempunyai hubungan serta perkumpulan sebagai hasil dari kesepakatan bersama. Tonnies membagi masyarakat ke dalam dua bentuk, yaitu *gemeinschaft* dan *gesellschaft*. Masyarakat kota sering-kali dikaitkan dengan *gesellschaft*, yaitu tipe masyarakat industri modern, yang berlandaskan pada ekonomi, impersonal dan *artificial* (Kinloch, 1977). Konsep Tonnies ini menyerupai Durkheim, di mana Durkheim menyebutnya dengan istilah solidaritas mekanik (*Mechanical Solidarity*) dan solidaritas organik (*Organic Solidarity*). Masyarakat kota menyerupai solidaritas organik yang telah mempunyai pola pembagian kerja yang jelas, individual dan mempunyai solidaritas rendah (Kinloch, 1977). Perkotaan menuntut *skill* atau keterampilan seseorang sebagai bekal dalam menghadapi persaingan baik secara lokal atau global.

Perkotaan, *Skill* dan Persaingan Global

Di perkotaan, keahlian (*skill*) seseorang sangat diperlukan untuk menunjukkan identitas atau peran yang dimainkannya. Bahkan individu yang sudah jelas bidang spesialisasinya pun akan ditinggalkan apabila potensi yang

dimilikinya dianggap kurang memuaskan konsumen. Sebagai contoh, meskipun di Jakarta banyak terdapat dokter ahli/spesialis masih banyak orang yang mencari dokter keluar negeri, seperti Singapura atau Malaysia. Ya. Itulah globalisasi dan persaingan dunia secara global yang melintasi ruang dan waktu. *Free trade*, merupakan suatu tantangan sekaligus peluang untuk meraih kepercayaan konsumen. Dalam tatanan ini, jarak bukan jadi hambatan lagi karena orang mengejar kualitas dan reputasi yang dicapai sebuah produk atau jasa. Maka, pada satu sisi globalisasi merupakan ancaman bagi pembangunan negara, yaitu dengan melemahnya kontrol negara, namun pada sisi lain merupakan suatu harapan untuk mengaktualisasikan diri sebagai tantangan dalam menembus pasaran dunia. Globalisasi mempunyai sebuah kekuatan yang mampu mengubah seorang individu bahkan komunitas. Globalisasi menggerakkan dunia ke arah keseragaman (*Uniformity*), namun demikian penguatan atas “*identity*” tetap tampak sebagai heterogenitas, bahkan kadang muncul sebagai identitas yang menguatkan suatu ikatan dalam menguatnya arah global. Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Geschiere dan Birgit Meyer “...Whether homogenization is seen positively in terms of McLuhan’s utopia of the ‘global village’, or negatively in terms of western imperialism, both views thrive on the assumption that the world is moving rapidly towards uniformity.” Selanjutnya dia menambahkan “...‘identity’ seems to become an investable analytical tool in order to grasp how globalization reinforced the production of cultural difference”. (Peter Geschiere dan Birgit Meyer, *Development and Change*: 1998)

Globalisasi dapat diartikan sebagai hubungan sosial secara intensif seluruh belahan dunia, walaupun dengan jarak yang berjauhan. Apa yang terjadi pada suatu negara dibentuk oleh kejadian-kejadian yang ada di negara lain dan dapat diketahui secara seksama di negara tersebut walaupun dengan jarak yang berjauhan. Singkatnya, globalisasi adalah terjadinya suatu proses dialektif antara negara-negara di dunia. Perubahan lokal merupakan suatu bagian globalisasi sebagai hubungan sosial yang melintasi jarak dan waktu (Giddens, 1994).

Pada tingkatan yang lebih umum globalisasi menunjukkan proses perubahan yang mempengaruhi seluruh wilayah dunia dalam berbagai sektor mencakup ekonomi, teknologi, politik, media masa, budaya dan lingkungan. Adapun yang menjadi sebab globalisasi adalah antara lain pertumbuhan tinggi dalam aliran ekonomi global terutama dalam perdagangan

dan modal inovasi ilmu pengetahuan terutama dalam teknologi informasi media secara global, munculnya urbanisasi ataupun hubungan internasional. (Castles, 2001).

Perkotaan, Kapitalisme dan *Life Style*

Dalam globalisasi ekonomi muncul usaha-usaha seperti *strategic management* yang bertujuan untuk mengadakan *forecast*, yaitu untuk menyelidiki hubungan antara organisasi dengan pasar, pemasok dan pelanggan. (H.A.R. Tilaar: 1997). Perkembangan perekonomian pasar pada tatanan global berhubungan dengan proses globalisasi ekonomi. Fenomena ini memunculkan suatu pandangan adanya proses dominasi ekonomi Barat, hegemoni sosial dan kultural, yang mengarah pada Amerikanisasi (*Americanizations*), yang secara langsung atau tidak telah mempengaruhi pola hidup masyarakat.

Globalisasi ekonomi yang melanda dunia sejak beberapa tahun yang lalu telah mempengaruhi pola hidup masyarakat. Pola konsumsi yang terjadi di belahan dunia lain dapat diikuti secara cepat di suatu negara. Budaya konsumen berubah menjadi budaya massa di mana pembentukan identitas sosial dan konsep diri dipengaruhi oleh pilihan konsumsi mereka. (Robberts: 1999). Contohnya pola konsumsi masyarakat diwilayah perkotaan seiring dengan tumbuh dan berkembangnya bisnis *franchise*.

Terciptanya kondisi sosial ekonomi masyarakat urban atau perkotaan saat ini erat kaitannya dengan perkembangan kapitalisme yang berperan atas munculnya budaya konsumen (*consumer culture*) yang menonjol pada masyarakat modern. (Lury, 1998). Coba sekarang kita lihat sebagai contoh, *fast food* seperti KFC, McDonald, Texas dan yang lainnya pernah dijadikan makanan *favorite* atau elite yang dikonsumsi sebagai cerminan gaul atau pola hidup modern. Perilaku konsumen untuk mengonsumsi suatu produk tidak terlepas dari proses seorang individu dalam memutuskan apa, kapan, di mana, bagaimana, dan dari mana dia membeli suatu barang atau jasa (Glenn, 1974).

Pola konsumsi *Fast food* bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, akan tetapi lebih dari sekedar itu, individu mendatangi tempat ini dengan berbagai alasan, mulai dari pilihan menu yang ditawarkan, fasilitas, *trend* maupun sebagai *life style*. Berbelanja di tempat-tempat tertentu, merupakan suatu aktivitas yang mengandung simbol tertentu, di mana kegiatan belanja bukan lagi sebagai suatu transaksi ekonomi

“sederhana” melainkan lebih sebagai interaksi simbolis di mana individu membeli dan mengonsumsi “kesan”, yaitu lebih untuk melihat pada simbol dan kesan yang ditimbulkan dengan mengonsumsi produk tersebut (Featherstone, 1998).

Sebenarnya apa yang ditawarkan oleh *franchise* tidak jauh berbeda dengan yang ditawarkan di warung nasi atau bahkan di pedagang kali lima, tapi mereka mampu mengemas produk dan telah memiliki reputasi sehingga mampu menarik minat konsumen. Di sinilah mulai tampak adanya *stratifikasi sosial* dalam menentukan pola konsumsi, sehingga memunculkan kesan kelas atas, menengah, atau bawah.

Perbedaan pangsa pasar dalam menentukan pilihan menunjukkan adanya perbedaan pasar menurut golongan pembeli, yang dalam pandangan Kotler disebut “*Market Segmentation*”. (Kotler, 1978). Timbulnya *free market* pada perekonomian dunia yang memunculkan perdagangan lintas negara, telah melahirkan negara-negara industri serta korporasi perdagangan raksasa yang mampu menyuplai produksinya ke negara-negara lain. Bagi negara-negara yang memiliki modal banyak seperti Amerika akan sangat mudah untuk menanamkan modal di negara-negara berkembang untuk mendapatkan upah rendah dengan keuntungan yang besar.

Dalam konteks pembangunan negara-negara, kebijakan liberalisasi ekonomi dan penilaian struktural diukur oleh badan internasional seperti World Bank dan IMF, secara khusus hal ini menunjukkan aspek atau hasil dari globalisasi. Konteks ini mengandung arti kurang lebih sama dengan kapitalisme monopoli, untuk menunjukkan suatu proses integrasi ekonomi yang mengarah pada penekanan perekonomian *free market* yang tersebar luas di wilayah dunia. (Jacqueline Bhabha: *Development and Change*: 1998).

Dengan meningkatnya isu globalisasi maka semakin kuat *skill* dan potensi yang harus dimiliki. Pendidikan atau ilmu pengetahuan menjadi kunci utama yang harus dipersiapkan dalam menempuh jalan persaingan di era global. Tentunya kita tidak mau terus menerus menjadi bangsa buruh yang diperkerjakan pada label bawah, hanya sebagai pemeran pelengkap tanpa menjadi pemeran utama.

Idealnya, ketika investor asing menanamkan modalnya di Indonesia maka selayaknya bangsa Indonesia sebagai bangsa pribumi mengambil peran yang signifikan dalam perusahaan tersebut, tentu dengan modal pendidikan dan ilmu pengetahuan. Jadi bangsa ini akan menikmati betul

kerja-sama yang dilakukan antar negara dan mendapatkan keuntungan yang signifikan. Dan akan lebih baik lagi kalau tidak mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi, karena mampu mandiri ketika bangsa lain (investor) meninggalkan Indonesia. Idealnya seperti itu. Akan tetapi realitas yang ada memperlihatkan masyarakat pribumi, bukannya terserap dalam kancah industri global, malah terpuruk di sektor informal.

Kalau kita lihat, sektor informal sekarang ini sangat didominasi oleh masyarakat pribumi. Para pedagang kaki lima yang berjejer di jalanan hampir bisa dikatakan 99,9 4 adalah bangsa pribumi. Jadi sebetulnya sektor inilah yang harus dibenahi, diberikan fasilitas dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan sebuah devisa buat negara. Namun sayang, sering kali sektor ini lebih dijadikan sebagai penghambat daripada sebagai lahan/*asset* yang harus diberdayakan.

Masalah Perkotaan: Sektor Informal dan Sikap Pemerintah

Pembangunan ekonomi dunia merupakan *issue* penting yang ditujukan melalui peningkatan aliran-aliran perdagangan, penanaman modal, buruh dan sebagainya. Dalam ekonomi global, berbagai negara atau kelompok dapat memperoleh kekuasaan berdasarkan pada ekonomi, politik atau kekuatan militer. Negara-negara yang kurang berkembang tidak dapat memperoleh otonomi (sebagaimana yang diajukan oleh teori Dependensi) sehingga mereka lebih berupaya menyerahkan dirinya ke dalam rangkaian ekonomi global untuk mencegah keterpinggiran. (Hyperlink: 2001). Oke-lah, untuk Indonesia sebagai negara berkembang akan berusaha untuk bisa menyeimbangkan kedudukan supaya tidak oleng dan terpinggirkan. Dalam kasus ini kita bisa lihat pada peristiwa datangnya George W. Bush pada 20 November lalu. Untuk menyambutnya, pemerintah Indonesia betul-betul berusaha menjadi tuan rumah yang baik, sehingga Kebun Raya Bogor mendapatkan perubahan yang cukup signifikan untuk landasan heli yang digunakan Bush, sekolah diliburkan dan beberapa ruas jalan diblokir.

Andai saja pemerintah menyikapi permasalahan intern perkotaan sama dengan menyikapi acara kunjungan Bush ke Indonesia, mungkin permasalahan perkotaan yang sekarang sedang marak akan cepat teratasi. Kalau untuk menyambut Bush pemerintah rela mengeluarkan biaya sampai 6 milyar, seharusnya rela juga untuk membangun fasilitas publik untuk penertiban PKL dan perumahan kumuh. Memang sih, masalah sosial perkotaan

ini cukup melelahkan kita, permasalahan PKL dan penggusuran sepertinya tidak pernah selesai.

Saat ini penggusuran tempat tinggal dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) marak terjadi dimana-mana baik di Jakarta ataupun luar Jakarta. Tangis pilu dan teriakan sudah tidak dihiraukan. Lantas apakah ini sebuah cermin ketertiban atau kekerasan? Memang sangat rumit permasalahan yang dihadapkan pada kasus ini. Satu sisi maraknya penjual kaki lima dan pemukiman kumuh yang biasa disebut *slump area* membuat pemandangan kota tidak nyaman. Tetapi di sisi lain mereka juga *toh* perlu hak hidup seperti manusia lainnya.

Keberadaan perumahan penduduk yang kurang layak ini sesuai dengan kondisi kota sebagaimana yang dikemukakan oleh Bintarto bahwa urbanisasi dari segi sosiologis dapat menimbulkan lapisan sosial baru yang menjadi beban kota. Karena kebanyakan dari mereka yang tidak berhasil hidup layak di kota akan menjadi “penggelandang” dan membentuk daerah *slum* atau daerah hunian liar (Bintarto, 1986).

Ketika kios seorang pedagang kaki lima dibongkar paksa atau perumahan mereka dihancurkan, ada muatan-muatan sosial yang sangat kompleks, antara kepentingan bersama atau individu, nilai-nilai manusiawi, ketertiban serta keindahan kota. Memang idealnya sebelum dihancurkan sudah diberikan tempat pengganti supaya tidak terjadi *shock*.

Berkaitan dengan penggusuran ini, sebagaimana ditulis *Human Right News* pada 6 September 2006, Sophie Richardson, Wakil Direktur Divisi Asia Human Rights Watch menyoroti langkah yang ditempuh pemerintah Jakarta dalam mengatasi PKL dan penggusuran. Menurut Richardson, bagaimanapun masyarakat miskin perkotaan mempunyai hak hidup yang sama dengan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, pemerintah Jakarta dinilai telah menggunakan kekuatan yang berlebihan untuk melaksanakan penggusuran tersebut dan gagal dalam menyediakan perumahan alternatif atau bantuan lain bagi mereka yang dipindahkan. Mengutip pendapat Sophie Richardson:

“Bukan saja pemerintah daerah telah gagal melindungi rakyatnya - dalam beberapa kasus pemerintah justru menyerang rakyat, Pemerintah seharusnya menetapkan moratorium atas praktik penggusuran sampai pemerintah dapat bermusyawarah dengan kelompok masyarakat sipil dan mendapatkan prosedur penggusuran yang lebih baik.”

Selanjutnya, Richardson dalam dokumen *Human Right News* menegaskan:

“Investor dan pengembang internasional harus memperhatikan buruknya catatan Jakarta dalam hal memindahkan warganya dengan cara yang manusiawi, Perusahaan asing yang terlibat dalam proyek-proyek semacam itu perlu memastikan adanya rencana mendetail yang telah dikembangkan untuk meminimalisir dampaknya terhadap warga, dan memastikan bahwa rencana tersebut benar-benar dijalankan.”

Fenomena pedagang kaki lima atau sering kita sebut dengan istilah PKL memang kerap kali menjadi masalah sosial yang menyita perhatian semua kalangan. Kalau kita perhatikan di kawasan pasar Ciputat misalnya, hampir setengah ruas jalan dipenuhi oleh PKL. Ini sangat mengganggu semua kalangan baik pejalan kaki ataupun pengguna sepeda motor atau mobil. Dan meskipun aparat telah berusaha menertibkannya tapi itu hanya berlaku dua atau tiga hari saja. Selebihnya mereka mulai menggelar lagi dagangannya di jalanan. Fenomena ini bisa kita sebut sebagai fenomena “sarang laba-laba”. Coba Anda perhatikan kalau membersihkan sarang laba-laba maka pada dua atau tiga hari berikutnya laba-laba tersebut akan membuat sarang lagi. Maka untuk mengatasinya harus dengan membersihkannya secara rutin. Begitu juga dengan PKL jalanan yang memenuhi ruas jalan pasar Ciputat dan di tempat lainnya. Mereka pergi ketika ada penertiban dan setelah penertiban berlalu mereka pun menggelar lagi dagangannya.

Memang sulit untuk mengatur tata ruang kota sesuai dengan harapan semua pihak, dalam artian tidak ada pihak yang merasa terzalimi atau dirugikan. Idealnya pemerintah bisa mewujudkan tata ruang kota yang indah, nyaman, tertib dan bersih. Masyarakat bisa berjalan dengan leluasa di trotoar jalan. Tanpa harus berdempet-dempetan dengan PKL atau kendaraan yang melintas. PKL pun bisa menjajakan dagangannya tanpa ada rasa *was-was* dengan gusuran dan dapat meraih untung dari hasil dagangannya untuk menghidupi anak istri atau keluarganya. Lokalisasi mungkin merupakan hal yang paling tepat, tapi lagi-lagi dihadapkan pada benturan lokasi yang “ideal”, mudah dijangkau pembeli seperti halnya jualan di ruas jalanan.

Hak Hidup Masyarakat Miskin Kota: Tata Ruang dan HAM

Penggusuran paksa yang terus berlangsung merupakan pelanggaran hukum nasional dan internasional. Sebagaimana penulis kutip dari *Human Right News* bahwa:

“Indonesia baru-baru ini meratifikasi dua perjanjian internasional, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang melarang pemerintah campur tangan secara tidak sah dengan masalah rumah seseorang dan menjamin hak atas perumahan yang layak. Standar internasional yang melindungi individu dari penggusuran paksa berfokus pada perlindungan bagi setiap individu yang menempati sebuah rumah dan lahan dan tidak tergantung pada bentuk kepemilikan tertentu atas tanah atau rumah tersebut, maupun keabsahan tinggal mereka”.

Lantas sejauh apakah langkah yang ditempuh oleh pemerintah? Ini harus dicermati. Dalam maraknya penilaian tentang globalisasi ekonomi, mampukah pemerintah mengatur perekonomian negaranya sendiri sebelum bersaing ke tingkat global. Kalau perekonomian di negeri kita ini sudah ada kemajuan maka kita Optimis untuk bersaing di tingkat global. Memang sektor-sektor informal seperti PKL sering menimbulkan permasalahan tapi kita juga harus mengakui kalau sektor ini banyak ditempati oleh masyarakat kita.

Tanggapan atau tulisan terhadap sektor informal, seperti PKL sering sekali dikemukakan karena fenomena ini sepertinya tidak pernah selesai, selalu muncul dan muncul lagi. Sikap pemerintah pun selalu dipertanyakan, sejauh mana penanganan permasalahan ini.

Permasalahan ini tidak terlepas dari permasalahan tata ruang kota antara ketertiban, kerapian serta keindahan dan hak hidup masyarakat miskin kota. Tapi pemerintah selalu mengambil poin pertama sebagai kebijakan yang diterapkan. Padahal sebetulnya pemerintah mempunyai peran yang penting dalam mengambil keputusan ini dan kalau “berminat” bisa mengambil langkah yang menguntungkan kedua belah pihak baik pemerintah ataupun para pedagang kaki lima.

Menurut Fuller (1976) para elite pembangunan -dalam hal ini pemerintah adalah para inovator yang mampu melihat ruang kota sebagai faktor produksi utama bagi pembangunan dan pertumbuhan. Mereka pada dasarnya adalah sebuah mesin bisnis pertumbuhan yang mampu menciptakan kekayaan dan kekuasaan bagi pemrakarsa dan pemiliknya (Siswanto,

2002). Jakarta, sebagai kota besar akan menjadi pusat kota yang mempunyai daya tarik tersendiri untuk mengundang masyarakat datang ke wilayah ini. Christaller dalam teori *Central Place*, mengatakan bahwa dalam perkembangan kota terdapat wilayah pusat yang mempunyai peranan bagi kota-kota sekitarnya sebagai mediator bagi perdagangan selanjutnya. (Christaller, 1960, lihat Gumilar, 1995). “Jadi sebaiknya, permasalahan yang harus kita pikirkan saat ini adalah langkah yang diambil pemerintah dalam pemberdayaan sektor informal serta harus adanya peninjauan kembali tata ruang kota. Kembali pada kasus pasar Ciputat, kemacetan yang selalu terjadi di wilayah ini karena ada beberapa faktor. Selain ruas jalan yang dipenuhi oleh pedagang kaki lima serta ojek, faktor lainnya adalah tidak adanya terminal tempat kendaraan untuk mengangkut penumpang sehingga tidak menunggu penumpang di depan pasar yang menimbulkan kemacetan. Ketiga, jalanan yang rusak memperlambat arus lalu lintas. Semua permasalahan ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dipikirkan secara serius.

Musyadad, seorang pemerhati sosial UMM dan aktivis LSM di Jawa Timur pernah menulis masalah PKL di Surabaya. Menurut dia, pemerintah kota Surabaya terjebak di antara tata ruang kota dan kesejahteraan warga. Dan akhirnya pemerintah menjatuhkan pilihannya pada poin pertama, yaitu pengaturan tata ruang kota dan penertiban PKL. Dalam analisa Musyadad, kelemahan pemkot dalam strategi penanganan PKL mengakibatkan usaha yang diambil sebatas karitatif, bukan persoalan fundamental yang menyelimuti fenomena PKL. Penertiban PKL ini hanya sebatas menyelesaikan persoalan pucuk gunung es yang tampak saja. Padahal sebaiknya, penanganan PKL ini menggunakan konsep “*Strategy Planning*” yang berbasis kesejahteraan Rakyat dan yang berkeadilan. Konsep ini akan memunculkan pola dan karakter persoalan di perkotaan yang fundamental (*the rooted problem of urban*) (Musyadad, 2003).

PKL hanyalah sebuah alternatif yang dipergunakan sebagai upaya untuk mempertahankan hidup dari himpitan kemiskinan. Permasalahan pertama yang muncul adalah kemiskinan kota karena adanya himpitan kapitalisme serta persaingan global yang menuntut *skill*. Lagi-lagi permasalahan ini kembali pada globalisasi ekonomi, di mana pemilik modal besar menjadi pihak pemenang dari persaingan global. Bahkan yang lebih mengerikan lagi ketika sektor-sektor informal ini semakin terpinggirkan

dengan adanya penawaran produk-produk kapitalisme yang lebih *marketable*. Contohnya, salah satu perusahaan *franchise* pernah menawarkan produk bubur ayam dengan harga yang relative sama dengan pedagang bubur dorong. Secara otomatis ini berdampak pada omset pedagang bubur dorong.

Di Makassar permasalahan PKL belum juga selesai. Mimpi mengubah nasib dan mendapatkan penghidupan yang layak menjadi daya tarik yang klise ketika orang mendatangi daerah perkotaan. Masih beruntung mereka yang mendapatkan pekerjaan walaupun di sektor informal. Akan tetapi, banyak yang akhirnya menjadi pengangguran dan gelandangan, dan akhirnya menjadi beban Pemerintah Kota Makassar. Sehingga muncul kebijakan Pemkot Makassar untuk membuat program penertiban gelandangan dan imbauan kepada warga kota untuk tidak memberikan uang bagi pengemis. Untuk itu, petugas Dinas Sosial ditempatkan di sejumlah titik jalan yang menjadi tempat menjamurnya pengemis dan gelandangan (Sri Ayu, 2006).

Lain lagi ketika kita lihat kasus di daerah Yogyakarta. Di sepanjang jalan Malioboro banyak sekali para pedagang kaki lima menjajakan dagangannya. Di sini tampak adanya ketertiban dan keleluasaan para pedagang menawarkan produknya. Mungkin konsep seperti inilah yang mendekati “idealisme”. Malioboro merupakan contoh dari tata ruang yang memperhatikan *space* bagi para PKL dengan diberdayakan dan diberikan tempat sehingga memberikan kekhasan tersendiri. Namun sayang belum semua kota bisa memberikan “*special space*” bagi para pedagang yang dikemas dalam tatanan yang mempunyai daya tarik tersendiri.

Persaingan Global, harapan, tantangan dan Peluang

Globalisasi merupakan pintu gerbang utama dalam menghadapi kehidupan pada jenjang berikutnya. Tentunya kita ingin memberikan warisan terbaik bagi anak cucu yang akan meneruskan pembangunan dimasa yang akan datang. Sebagai bangsa yang beradab maka seharusnya selalu memberikan contoh yang menjadi panutan dalam catatan buku sejarah perjalanan bangsa.

Dalam menghadapi persaingan global, ilmu pengetahuan dan *skill* menjadi kunci utama. Maka pendidikan dan *skill* harus menjadi prioritas yang harus dikedepankan. Ini sangat berhubungan dengan kebijakan pemerintah untuk memperbesar anggaran pendidikan dalam APBN. Pendidikan menjadi hak dan bisa dinikmati oleh semua masyarakat.

Pedagang kaki lima sebagai sektor perekonomian informal perlu penanganan khusus dari pemerintah secara kontinu dan berkesinambungan. Ketidakteraturan pedagang kaki lima akan berakibat pada sektor lain seperti transportasi dan kebersihan kota. Namun tentunya pemerintah harus memberikan kebijakan yang berbasis pada keadilan dan kemanusiaan, tidak dengan menggunakan tangan besi kekuasaan. Pemberdayaan dalam sektor ini akan meningkatkan devisa bagi negara. Dan satu hal yang perlu diingat bahwa sektor ini didominasi oleh bangsa pribumi yang mempunyai hak penuh akan kehidupan sebagai warga negara yang sah.

Dengan semakin banyaknya tulisan yang mengkritisi perkotaan dan permasalahan yang ditimbulkannya semoga pemerintah kota lebih meningkatkan lagi perhatiannya pada masalah tata ruang kota. Tertatanya perekonomian di perkotaan diharapkan bisa berdampak positif pada pembangunan di wilayah sekitarnya sebagai bias yang ditimbulkan. Demikian juga dengan tertatanya perekonomian di tingkat lokal, maka kita akan optimis untuk bisa bersaing di tingkat global.

Kesuksesan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan perkotaan bisa memberikan harapan untuk bisa menghadapi persaingan Global. Dengan asumsi kota sebagai relief dari pembangunan suatu negara. Kenyataan yang kita hadapi saat ini, bahwa persentase wilayah perkotaan dan pedesaan masih timpang. Jadi, kapan para elite pemerintahan melanjutkan pembangun di wilayah pedesaan? Sejauh mana langkah yang ditempuh dalam menghadapi persaingan global? Ya, penulis sendiri mengakui bahwa yang dijalani saat ini masih jauh dari tataran “ideal” tapi bukan berarti kita harus berdiam meratapi ketertinggalan. Toh masih banyak hal lain yang bisa dibanggakan dari negeri.

Daftar Pustaka

- Bintarto, R., *Urbanisasi dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Casttels, Stephen, *Development, Social Transformation and Globalization*, Data Internet, 2001.
- Chen, SJ. Peter, Evers, Dieter, Hans., *Studies in ASEAN: Sociology Urban Society and Social Change, Chopmen Enterprise*, Singapore, 1978.
- David, Held. *A Globalizing Word? Culture, Economics, Politic*, London: Routledge, 2000.

- Featherstone, Mike, "Budaya Konsumen, Kekuatan Simbolis dan Universalisme" dalam Evers, Dieter, Hans (ed.), *Teori Sosial Masyarakat dalam Sistem Dunia Modern*, terj. Maris, Masri, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Giddens, Anthony, *The Consequence of Modernity*, Cambridge: Polity Press, 1994.
- Human Rights Watch., *Indonesia: Pemerintah Jakarta Harus Menghormati Hak Rakyat Miskin Kota atas Perumahan*, Jakarta, 6 September 2006.
- Kinloch, Graham. C., *Sociological Theory*, United State of America: McGraw-Hill Inc, 1977.
- Kotler, Philip., *Marketing Management: Analysis Planning and Control*, New Delhi: Prentice Hall India, 1978.
- Lurry. C., *Budaya Konsumen*, terj, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 1998.
- Meyer, Birgit & Geschiere, Peter., *Development and Change: Globalization and Identity Dialects of Flows and Closures*, Vol.29, Oxford: Blackwell Publishers, 1998.
- Musyadad, Edy, "Kesejahteraan PKL Versus Kesejahteraan Kota", *Kompas*, Rabu, 28 Mei 2003.
- Reading, F. Hugo., *Kamus Ilmu-ilmu Sosial*, terj Sahat Sinamoro, Rajawali, Jakarta.
- Robbert, K., *Leisure in Contemporary Society*, New York: Cab Publishing, 1999.
- Social Change in the 20th Century: A Review of the Literature*. Hyperlink <http://redrival.net/evaluation/socialchange/change.htm>
- Soemantri, R Gumilar., "Urbanization Process and Housing Policy for the Poor in Jakarta: Towards A New", *Paradigm: Jurnal Masyarakat*, (2000).
- Siswanto, Andi., "Akumulasi Kapital dalam Pembangunan Kota", *Kompas*, 7 Juni 2002.
- Tilaar. H.A.R., *Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi*, Jakarta: PT Grasindo, 1997.
- Turner, Jonathan H., *The Structure of Sociological Theory*, California: Wadsworth Publishing Company, Belmont, 1990.
- Sri Ayu, Reny Taslim., "Undang Pesona, Sekaligus Derita", *Kompas*, Sabtu, 11 November 2006.
- Walters, C. Glenn, *Consumer Behavior: Theory and Practice*, Illinois: Richard D. Irwin, Inc, 1974.

ISSN 0215-6253 (print)



9 770215 625008

ISSN 2714-6103 (online)



9 772714 610004